

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Skripsi ini ditulis guna mengungkap mekanisme *governmentality* dalam membentuk pola ekonomi ASEAN melalui prinsip integrasi ekonomi ASEAN yang dipromosikan sebagai perwujudan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh negara anggota. Hal ini dianggap penting karena terdapat 11 (sebelas) negara anggota yang tergabung dengan kepentingan dan tujuan yang sama dalam naungan ASEAN. Seluruh negara regional memiliki hak dalam tercapainya pertumbuhan ekonomi yang merata, walaupun dalam praktik dan perkembangannya hanya beberapa negara besar seperti Indonesia, Singapura, Thailand, dan Malaysia saja yang menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Sementara disisi negara lain seperti Laos, Kamboja dan Myanmar memperlihatkan pertumbuhan yang kurang signifikan dan cukup tertinggal. Skripsi ini akan berfokus pada cara kekuasaan beroperasi di ASEAN dengan melihat perbandingan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi pada Indonesia dan Laos menggunakan teori *governmentality* yang digagas oleh Michel Foucault. Teori ini menjadi pisau untuk menelusuri ambiguitas makna dan implementasi prinsip integrasi ekonomi ASEAN, serta menjelaskan hasil pendisiplinan dari kekuasaan dan pengetahuan yang sering kali menjadi alat untuk mengendalikan sesuatu.

Narasi kekuasaan dan pengetahuan merupakan hasil kritik Foucault terhadap suatu pengetahuan dan pandangan tradisional yang cenderung netral dan

objektif. Foucault melihat bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, sebab pengetahuan sering berfungsi sebagai alat kekuasaan. Pengetahuan bukan hanya sebagai alat untuk memahami dunia, tetapi juga cara untuk mengendalikan masyarakat, serta menciptakan narasi yang dapat mendefinisikan yang benar dan salah. Implikasi *power knowledge* dalam studi hubungan internasional dapat berupa kebenaran identitas dan narasi sosial, politik kekuasaan, serta hak asasi manusia (Foucault 1980, 119).

Foucault mengemukakan “kebenaran” dalam masyarakat ekonomi politik merupakan buah yang dihasilkan dari berbagai bentuk pembatasan, bukan hanya ide di luar kekuasaan, maupun hak istimewa dari sebuah pembebasan. Narasi kebenaran menurut Foucault mencakup lima sifat penting, di antaranya; (1) kebenaran berporos pada wacana ilmiah yang memproduksinya; (2) kebenaran tunduk di bawah tuntutan kekuasaan politik dan ekonomi; (3) terdapat kendali yang mengontrol kebenaran; (4) kebenaran ialah objek dari bentuk-bentuk penyebaran; serta (5) kebenaran akan selalu menjadi konfrontasi politik dan sosial (Foucault 1980, 131).

Dalam memahami makna integrasi ekonomi ASEAN, relasi pengetahuan dan kekuasaan membentuk pendisiplinan bagi setiap negara ASEAN dari narasi integrasi ekonomi yang dibentuk dan didisiplinkan. Foucault mengartikan *governmentality* sebagai kekuasaan di era modern yang bekerja bukan hanya melalui pengawasan atau pemaksaan langsung, tetapi juga melalui serangkaian teknik dan pengetahuan yang memungkinkan negara dan institusi sosial mengatur perilaku individu dan populasi secara lebih halus dan terselubung (Foucault 1977,

207).

Kerangka *governmentality* dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana ASEAN membentuk mekanisme pendisiplinan ekonomi yang diinternalisasi oleh negara-negara anggotanya, bukan sebagai pemaksaan langsung, tetapi melalui normalisasi kebijakan integrasi ekonomi yang tampak netral dan universal. Mekanisme ini beroperasi dalam bentuk regulasi, standar perdagangan, serta diskursus mengenai pertumbuhan dan kesetaraan ekonomi yang secara implisit membentuk hierarki baru dalam kawasan.

Meskipun ASEAN mengusung prinsip integrasi dan kesetaraan ekonomi, realitas menunjukkan adanya asimetrisme ekonomi, di mana negara-negara dengan infrastruktur dan kapasitas ekonomi yang lebih besar, seperti Indonesia, lebih mampu mengadopsi dan mengambil keuntungan dari sistem yang ada (ASEAN 2025). Sebaliknya, negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang masih rendah, seperti Laos yang sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri untuk memenuhi tingkat kesepakatan yang harus dicapai. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya, serta beberapa faktor historis serta pola pembentukan struktur ekonomi yang telah diwariskan sejak masa penjajahan.

Mengungkap realitas sejati dari proses integrasi ekonomi menjadi hal yang krusial, mengingat ASEAN merupakan salah satu kawasan regional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling dinamis dan beragam secara global. ASEAN tidak hanya merepresentasikan model integrasi ekonomi yang khas di tengah heterogenitas politik, etnis, dan latar belakang negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai contoh pembanding dan

rujukan bagi institusi regional lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin setiap prinsip dan wacana yang diusung dalam integrasi ekonomi ini benar-benar diwujudkan secara nyata, guna menciptakan manfaat yang merata bagi seluruh negara anggota dan memperkuat posisi ASEAN di panggung ekonomi global.

Dalam ranah hubungan internasional, diplomasi dan kerja sama sering kali dianggap sebagai sesuatu yang pasti dan netral. Namun, studi ini berusaha untuk menggali lebih dalam, apakah dalam praktiknya terdapat wacana kebijakan dan pengetahuan yang diproduksi oleh ASEAN yang lebih banyak didorong oleh negara-negara besar dengan pengaruh ekonomi dan politik yang lebih kuat. Definisi pengetahuan dan kekuasaan menurut Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan tidak pernah netral, melainkan sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan. Dalam konteks ASEAN, hal ini bisa berarti bahwa kebijakan-kebijakan integrasi ekonomi lebih cenderung mendukung kepentingan negara besar. Sementara itu, negara-negara yang kurang berkembang cenderung hanya mengikuti arus kebijakan tanpa mendapatkan manfaat yang signifikan. Dengan demikian, pengetahuan berfungsi sebagai alat yang mendukung dominasi negara-negara yang lebih kuat, serta memperlebar kesenjangan dalam proses integrasi ekonomi di ASEAN.

ASEAN memiliki serangkaian agenda dan prioritas dalam mengelola dan meningkatkan kemajuan kawasan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, ASEAN menginisiasikan perluasan perdagangan bebas kawasan sebagai keseriusan pembangunan maupun pemerataan ekonomi kawasan. Serangkaian inisiatif yang

dibentuk ASEAN melahirkan Visi ASEAN 2020, yang kemudian dipercepat menjadi tahun 2015 melihat kondisi kawasan yang memerlukan integrasi ekonomi secepatnya. Visi ini diwujudkan melalui pembentukan AEC (ASEAN 2024).

MEA atau komunitas ASEAN dalam lingkup ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan wilayah yang mendukung mobilitas bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta mendorong arus modal yang lebih terbuka. MEA ditujukan untuk memperkuat daya saing ASEAN di kancah ekonomi global dengan membangun pasar terpadu dan basis produksi yang menyatu, serta mempersempit kesenjangan ekonomi antarnegara anggota, sehingga dapat mencapai kemakmuran yang merata di seluruh kawasan. MEA juga dirancang untuk memperkuat peran ASEAN dalam rantai pasokan global dengan mendorong investasi asing dan meningkatkan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggotanya (ASEAN 2024, 1-2).

ASEAN memiliki harapan terciptanya iklim bisnis yang lebih kompetitif dan stabil melalui harmonisasi standar dan penghapusan hambatan tarif maupun non-tarif yang diterapkan. Namun, meskipun inisiatif ini membawa manfaat besar, tantangan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar-negara anggota masih signifikan, terutama bagi negara-negara dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah. Sehingga, ASEAN terus berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan yang inklusif agar manfaat MEA dapat dirasakan secara merata di seluruh kawasan.

Indonesia dan Laos menjadi objek komparasi dalam penelitian ini karena kedua negara memegang kepemimpinan ASEAN secara berturut-turut.

Kesempatan keketuaan ini ibarat pisau bermata dua: di satu sisi, kepemimpinan ini memberi peluang untuk mendorong prioritas kebijakan yang sesuai dengan arah dan kepentingan masing-masing negara. Di sisi lain, terdapat tantangan besar untuk memenuhi ekspektasi regional dan internasional, di mana Indonesia dan Laos perlu menavigasi kepemimpinan yang efektif demi stabilitas dan keselarasan kawasan dalam mencapai tujuan integrasi yang lebih merata dan inklusif.

Julukan *Landlocked Country* diberikan kepada Laos yang dengan kata lain Laos ialah satu-satunya negara yang tidak memiliki laut di ASEAN, hanya daratan saja. Keterbatasan ini menjadi menarik sebagai komparasi untuk melihat upaya yang dimaksimalkan ASEAN maupun internal Laos dalam menjaga alur keluar masuk komoditas perdagangan melalui perbatasan darat. Di sisi lain, Indonesia yang memiliki akses laut yang luas, memberikan perspektif kontras mengenai bagaimana peran geografis dapat memengaruhi kontribusi dan tantangan dalam kerangka integrasi ekonomi ASEAN (ASEAN Indonesia 2023).

Indonesia merupakan negara dengan letak strategis dan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, memiliki peran kunci dalam mendorong integrasi ekonomi regional serta memperkuat konektivitas antar negara di wilayah tersebut. Dengan akses laut yang luas, Indonesia memiliki keuntungan logistik dan perdagangan, memungkinkan negara ini menjadi penghubung utama dalam rantai perdagangan ASEAN. Namun, dengan latar belakang ketimpangan ekonomi di ASEAN, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa kebijakan dan proyek regional juga memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN yang lebih kecil dan kurang berkembang, seperti Laos. Dengan keunggulan dan tantangan

dari Indonesia dan Laos, peran ASEAN sebagai Lembaga regional sangat penting bagi pertumbuhan dan stabilitas negara anggota (Center of Risk Management and Sustainability 2024).

ASEAN *Statistics Division* (ASEANstats) sebagai salah satu unit dibawah naungan ASEAN *Economic Community Department* dari sekretariat ASEAN memiliki tugas dalam pelayanan data statistik kepada Sekretariat ASEAN, badan-badan ASEAN, maupun para pemangku kepentingan (ASEANstats Data Portal 2018). Dalam penyajian data untuk melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Laos, ASEANStats menunjukkan indikator statistik penanaman investasi asing, statistik perdagangan barang internasional, dan indikator SDG yang menunjukkan peningkatan arus penanaman investasi asing yang masuk ke Indonesia dan Laos secara domestik dan kesenjangan secara regional (*economic inequality*).

Kesenjangan menghasilkan perbedaan yang tidak adil dalam standar hidup masyarakat satu dan yang lainnya. Salah satu hal yang mempengaruhi besar kecilnya investasi asing yang masuk ke suatu negara ialah nilai tukar. Jika nilai tukar suatu negara fluktuatif atau cenderung melemah, risiko investasi menjadi lebih tinggi karena potensi kehilangan nilai keuntungan ketika dikonversi ke mata uang asal. Di sisi lain, nilai tukar yang stabil atau cenderung menguat memberikan kepastian lebih kepada investor tentang prospek keuntungan mereka.

Indonesia memiliki nilai tukar rupiah yang lebih stabil dan likuiditas pasar keuangan yang lebih baik dibandingkan Kip Laos yang cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi di pasar global, sehingga menjadikannya lebih berisiko bagi

investor asing. Akibatnya, investor lebih tertarik berinvestasi di negara seperti Indonesia yang menawarkan stabilitas makroekonomi lebih baik serta ukuran ekonomi yang lebih besar. Selain nilai tukar, faktor-faktor lain seperti skala ekonomi, infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan akses pasar yang luas turut mempengaruhi kesenjangan investasi asing antara Indonesia dan Laos. Indonesia yang memiliki perekonomian lebih maju dan beragam, menawarkan daya tarik investasi yang lebih tinggi, sementara Laos dengan status negara berkembang dan keterbatasan infrastruktur, sering kali dipandang kurang menguntungkan oleh para investor (Kurniasih 2020, 8).

Implementasi prinsip integrasi ekonomi ASEAN semakin dipertanyakan keefektifannya. Melihat perbedaan luas dan jumlah penduduk, nilai tukar, kebijakan domestik dan beragam indikator lainnya, apakah integrasi ekonomi ASEAN dapat dibuktikan sebagai diskursus yang dapat menguntungkan negara kecil seperti Laos untuk mencapai stabilitas ekonomi, atau justru mengontrol roda kesenjangan maupun mengarahkan kebijakan ekonomi sesuai kepentingan negara besar seperti Indonesia. Akibatnya, tujuan ASEAN untuk menciptakan pembangunan yang merata diseluruh kawasan menjadi sulit tercapai dan tantangan ketimpangan semakin mengakar dalam struktur ekonomi kawasan.

Perbedaan arus investasi di atas juga menunjukkan bagaimana mekanisme integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi teknis seperti nilai tukar atau kebijakan domestik, tetapi juga pada mekanisme pendisiplinan ekonomi yang membentuk perilaku negara-negara anggota dalam mengadopsi dan menyesuaikan diri dengan norma ekonomi regional. Dalam

konteks ini, *governmentality* ASEAN beroperasi dengan menciptakan standar-standar ekonomi tertentu yang diinternalisasi oleh negara-negara anggota sebagai aturan "alami" yang harus diikuti, tanpa disertai ruang kritis untuk mempertanyakan dampak dari standar tersebut terhadap negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih rendah.

Indonesia dengan kapasitas ekonomi yang lebih besar dan infrastruktur yang lebih kuat, lebih mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme ini dan mendapatkan manfaat dari sistem integrasi ekonomi yang ada. Sebaliknya, Laos, dengan kapasitas ekonomi yang lebih terbatas dan warisan pendisiplinan ekonomi dari era kolonial, menghadapi hambatan struktural yang membuatnya lebih sulit untuk beradaptasi dengan standar ASEAN yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya merupakan proses teknokratis, tetapi juga ruang di mana kekuasaan bekerja dalam mendisiplinkan negara-negara anggota untuk mengikuti jalur ekonomi tertentu, yang tidak selalu menguntungkan semua pihak secara setara.

Dalam regional Kawasan Asia Tenggara, ASEAN hadir dengan fungsi sebagai forum dan jembatan kerja sama maupun pengambilan keputusan antar negara kawasan. Secara genealogi, ASEAN lahir pada tahun 1967 oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand, di tengah situasi sulit akibat Perang Vietnam. Negara anggota pertama di luar lima negara pendiri yang bergabung pada tahun 1984 ialah Brunei Darussalam, yang kemudian diikuti oleh Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja pada tahun 1995 (ASEAN 2025).

Sejak pendiriannya, ASEAN telah menjalankan berbagai inisiatif dan bentuk kerja sama guna mendorong integrasi ekonomi dan sosial di wilayah Asia Tenggara. Salah satu langkah awalnya adalah penandatanganan perjanjian perdagangan bebas pada tahun 1977 yang bertujuan menyederhanakan prosedur administratif serta meningkatkan arus perdagangan antar negara anggota. Kemudian, pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, dibentuklah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan sasaran utama mengatur lalu lintas barang di pasar serta memperkuat integrasi ekonomi dalam sektor barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil (ASEAN Secretariat 2024).

Dengan lahirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN akan semakin memperluas sayap integrasi ekonominya melalui transformasi regional, menjadi pasar tunggal dengan basis manufaktur, menciptakan perekonomian yang lebih kompetitif, dan melibatkan berbagai perekonomian dengan landasan yang adil. Semakin seriusnya keterlibatan para inisiator dari negara-negara Asia Tenggara terus mendorong konsep dan proyek ASEAN menjadi lebih inovatif dari tahun ke tahun, seperti perkembangan MEA pada tahun 2015. Munculnya berbagai ide dan proyek di ASEAN sejalan dengan prinsip non-intervensi ASEAN, yang berpeluang meningkatkan nilai kerja sama antar semua anggota ASEAN dalam semangat antar pemerintahan (ASEAN 2024).

Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 mengembangkan konsep integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Empat kiat prioritas dalam AEC mencakup (1) market dan basis tunggal produksi yang terkoneksi dalam kawasan; (2) kesiapan berdaya saing

tinggi dalam ekonomi; (3) pemerataan pembangunan ekonomi kawasan; serta (4) mengintegrasikan kawasan dengan ekonomi global (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2024). Hal ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar, meningkatkan nilai perdagangan, dan meningkatkan kualitas/efisiensi/ daya saing produk manufaktur. Integrasi ekonomi ASEAN disusun untuk mewujudkan kemakmuran bagi setiap negara anggota dan harus diupayakan dengan sumber daya yang besar, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan masing-masing negara.

Perwujudan integrasi ekonomi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat didukung pula dengan kesempatan estafet keketuaan oleh setiap negara. Setiap negara yang sedang memegang keketuaan ASEAN dapat memperlihatkan pertumbuhan dan kemajuan ekonominya secara lebih unggul, membangun kebijakan bagi sektor prioritas, maupun memperkenalkan potensi pariwisata setiap negara (ASEAN Indonesia 2023). Pada tahun 2023, Indonesia memegang peran sebagai pemimpin ASEAN membawa tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”. Melalui peran ini, Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baik di tingkat regional maupun global, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai identitas serta kepentingan nasional Indonesia dalam agenda keketuaannya.

Pada tahun 2024, Indonesia memberikan tongkat estafet kepemimpinan ASEAN kepada Laos. Sebagai negara kecil, kepemimpinan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Laos untuk tetap memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan ASEAN di samping kondisi domestik negara tersebut. Kepemimpinan Laos dalam

ASEAN 2024 membawa tujuan besar untuk tetap memperjuangkan “kesetaraan” ASEAN, ditengah banyaknya ketergantunagn dengan negara besar luar kawasan. Mengurangi kesenjangan ekonomi dalam mencapai integrasi ekonomi tidak hanya menjadi tantangan besar bagi Laos dan Indonesia, tetapi juga bagi ASEAN sebagai payung regional yang akan selalu dipertanyakan efektifitasnya dalam mewujudkan setiap prinsip maupun pilar yang direncanakan (ASEAN Lao PDR 2024).

Keketuaan Laos 2024 mengusung tema “*ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience*” dengan makna pentingnya meningkatkan konetivitas untuk tercapainya integrasi ekonomi antarpilar ASEAN dan penguatan ketahanan ASEAN dalam navigasi berbagai tantangan. Melalui tema ini, Laos akan menahkodai serangkaian agenda ASEAN tetap pada prioritas kerjasama, mempromosikan integrasi ASEAN, penguatan hubungan dengan serangkaian mitra eksternal ASEAN, serta mewujudkan ASEAN yang siap bersaing, adil, dan berkelanjutan (ASEAN Lao PDR 2024).

Berdasarkan fenomena yang ingin dieksplorasi dalam penelitian ini, hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan menciptakan kondisi di mana negara-negara besar dapat menjaga dominasi ekonominya, di samping negara kecil yang terjebak dalam struktur yang tidak menguntungkan. Dominasi pengetahuan oleh negara-negara besar tidak hanya menentukan diskursus kebijakan, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang lebih menguntungkan bagi negara-negara dengan kapasitas ekonomi lebih kuat. Meskipun ASEAN mengusung prinsip kesetaraan dan integrasi, realitas menunjukkan bahwa negara

kecil seperti Laos masih menghadapi hambatan dalam mengakses manfaat penuh dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mekanisme *governmentality* dalam kebijakan ekonomi ASEAN mereproduksi ketimpangan struktural dan memperkuat dominasi ekonomi negara-negara besar seperti Indonesia dalam dinamika regional.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Merujuk penjabaran dalam latar belakang, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Bagaimana mekanisme *governmentality* dalam ASEAN memengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia dan Laos?
- b. Mengapa Indonesia lebih mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibandingkan Laos dalam kerangka kesetaraan integrasi ekonomi ASEAN?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap makna dan pengaruh praktik *governmentality* dalam integrasi ekonomi ASEAN yang mencakup perwujudan stabilitas dan kesetaraan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Laos. Selain itu, eksplorasi ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Indonesia sebagai salah satu kekuasaan besar di ASEAN dalam mengadaptasi serta mengimplementasikan prinsip integrasi ekonomi ASEAN.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat guna mengembangkan kajian dan pemahaman hubungan internasional terkait institusi regional melalui makna dan perwujudan prinsip integrasi ekonomi ASEAN bagi stabilitas dan pemerataan ekonomi kawasan.

### **1.4.1 Manfaat akademis**

Secara akademis, penelitian ini berguna sebagai sumber pemahaman untuk mengungkap makna dasar integrasi ekonomi ASEAN melalui perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Laos. Dalam penelitian ini, ASEAN sebagai organisasi regional kawasan memainkan peran penting bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi kawasan yang merata bagi setiap negara anggotanya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu hasil analisa mahasiswa yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan pemahaman baru bagi pihak yang membutuhkan pemaparan terkait lingkup topik yang berkaitan dengan integrasi ekonomi ASEAN bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus melihat dampak implementasi prinsip “integrasi” dan “kesetaraan” sebagai diskursus yang sering kali menyembunyikan kenyataan tentang ketidakmerataan dan distribusi keuntungan yang tidak seimbang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam enam bab utama, di mana masing-masing bab terdiri atas subbab yang disesuaikan dengan fokus kajian. Bab pertama membahas

latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. Bab kedua memuat rewiu lilteratur, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, serta hipotesis atau argumen sentral. Bab ketiga mengulas genealogi *governmentality* dalam konteks prinsip integrasi ekonomi ASEAN, dengan menelusuri jejak awal hadirnya mekanisme kekuasaan di kawasan Asia Tenggara dan dalam tubuh ASEAN. Bab keempat membahas prinsip-prinsip integrasi ekonomi ASEAN serta pelaksanaannya, dengan penekanan pada analisis perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Laos. Bab kelima menelaah dinamika kekuasaan *governmentality* ASEAN melalui perspektif panoptikon. Bab terakhir, yaitu Bab enam, berisi simpulan akhir serta inferensi dari keseluruhan pembahasan.

